

# **KLIPPING BERITA MEDIA MASSA**



**Sabtu-Senin, 09-11 Maret 2019**



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Sabtu, 09 Maret 2019	Tol Trans-Sumatra Dorong Industrialisasi	Sejumlah kalangan menilai pengoperasian jalan tol Trans-Sumatra bakal menopang industrialisasi berbasis sumber daya alam di Pulau Andalas. industrialisasi menjadi kunci agar perekonomian Sumatera tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan.
2	Bisnis Indonesia (halaman 10)	Sabtu, 09 Maret 2019	Milenial Bisa Akses Rumah Bersubsidi	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menawarkan kalangan milenial mengakses rumah bersubsidi dengan harga di bawah 150 juta. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan peluang milenial mendapatkan rumah murah terbuka lebar apalagi dengan berkembangnya teknologi mencari rumah tak lagi rumit dan lama.
3	Bisnis Indonesia (halaman 5)	Senin, 11 Maret 2019	Perkembangan Masih Belum Nyata	Perkembangan pembangunan kota baru atau kota mandiri di Indonesia boleh dikatakan mandek. Belum ada pembangunan kota baru yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, selain Kota Maja di Banten. Pengembangan pun meminta pemerintah focus dan memacu pengembagan kota baru. Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa perkembangan pembangunan kota baru masih datar dalam beberapa tahun terakhir.
4	Kompas (halaman 16)	Senin, 11 Maret 2019	Situs Purbakala di Tol Pandaan-Malang Dikaji	Pihak PT Jasa Marga masih menunggu kajian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terkait penemuan situs purbakala sebelum melanjutkan pembangunan sebagian ruasJalan Tol Pandaan-Malang seksi V. Pembangunan terhenti satu pecan menyusul penemuan struktur yang diduga situs purbakala di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
5	Media Indonesia (halaman 14)	Senin, 11 Maret 2019	Berita Foto	Tol Trans-Sumatra sesi ruas Bhakauheni-Terbangi Besar diresmikan Joko Widodo di Lampung.
6	Media Indonesia (halaman Utama)	Sabtu, 09 Maret 2019	Tol Trans-Sumatra Gerakkan Ekonomi	Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyatakan terbukannya konektivitas melalui Tol Trans-Sumatra (JTTS) aan membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatra. "Hari ini merupakan salah satu catatan sejarah, yakni pembangunan infrastruktur konektivitas menyatukan Indonesia, terutama Jawa-Sumatra dengan JTTS dan dermaga eksekutif, yang Insya Allah menjadi tumpuan pusat pertumbuhan ekonomi baru setelah Jwa," kata Ridho kemarin seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian ruas Tol Bhakauheni-Terbangi Besar di Lampung yang berjarak 140,9 km dan merupakan ruas tol terpanjang yang pernah diresmikan Jokowi.
7	Media Indonesia (halaman 2)	Sabtu, 09 Maret 2019	Banjir di Tol buka lantaran Salah Desain	Pemerintah menyimpulkan bahwa banjir yang melanda setidaknya 15 kabupaten di Jawa Timur, termasuk ruas Tol Ngawi-Kertosono, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Terendamnya Tol Trans-Jawa di Madiun itu pun bukan karena salah desain.
8	Media Indonesia (halaman 11)	Sabtu, 09 Maret 2019	KEK Pariwisata Mudahkan Investasi	Pemerintah serius membangun dan meningkatkan geliat pariwisata di wilayah Indonesia Timur. Asisten Deputi Bidang Investasi Kementerian Pariwisata, Hengky Manurung, menyampaikan hal itu dalam acara Forum Pariwisata Australia-Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Gold Coast, Queensland Australia, Tom Tate. Salah satunya menetapkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di daerah potensial. Tujuannya agar investor lebih mudah menanamkan modal.

Judul	<b>Tol Trans-Sumatra Dorong Industrialisasi</b>	Tanggal	Sabtu, 09 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Sejumlah kalangan menilai pengoperasian jalan tol Trans-Sumatra bakal menopang industrialisasi berbasis sumber daya alam di Pulau Andalas. industrialisasi menjadi kunci agar perekonomian Sumatra tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan.		

► JALAN BEBAS HAMBATAN

# Tol Trans-Sumatra Dorong Industrialisasi

Bisnis, JAKARTA —

Sejumlah kalangan menilai pengoperasian jalan tol Trans-Sumatra bakal menopang industrialisasi berbasis sumber daya alam di Pulau Andalas. Industrialisasi menjadi kunci agar perekonomian Sumatra tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Bakauheni-Terbangi Besar sepanjang 140,9 kilometer pada Jumat (8/3). Ruas tol itu merupakan pertama dari 24 ruas jalan tol Trans-Sumatra yang dibangun bertahap hingga 2024.

Selain jalan tol, Presiden juga meresmikan terminal dan dermaga eksekutif Merak Sosoro, terminal dan dermaga eksekutif Bakauheni Anjungan Agung yang dibangun PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) setelah diuji coba pada masa angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Presiden juga meresmikan terminal baru Bandara Internasional Radin Inten II Lampung dan terminal baru Bandara Silampari Lubuklinggau.

Tol Trans-Sumatra merupakan megaprojek yang lahir dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang dicetuskan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Total yang perlu diinvestasi untuk menyelesaikan proyek itu mencapai Rp476 triliun. Jumlah itu hampir seperti-ga dari anggaran infrastruktur kumulatif (2015-2019) sebesar Rp1.739 triliun.

Hingga akhir 2019, sebanyak lima ruas jalan tol Trans-Sumatra siap digunakan,



## Sebaran Kawasan Ekonomi Khusus di Sumatra

KEK Beroperasi	Luas (ha)	Sektor Unggulan
Arun Lhokseumawe, Aceh	2.622,48P	Petrokimia, Pengolahan CPO, Kayu, Energi
Sei Mengkei, Sumatra Utara	2.002,70	CPO, Karet, Logistik, Pariwisata
Galang Batang, Kepri	2.333	Bauksit, Logistik
<b>KEK Konstruksi</b>	<b>6.958,18</b>	
Tj Api Api, Sumatra Selatan	2.030	CPO, Karet, Logistik, Petrokimia
Tanjung Kelayang	324,4	Pariwisata
	2,354	

Sumber: Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, diolah

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

menyusul ruas Palembang—Indralaya sepanjang 22 kilometer yang sudah beroperasi sejak tahun lalu.

Dirut PT Utama Karya (Persero) Bintang Perbowo mengatakan tol Bakauheni—Terbangi Besar bakal memperlancar arus barang dan jasa karena waktu tempuh lebih singkat. "Dengan diresmikannya Ruas Tol Bakauheni-Terbangi Besar ini, akan membawa dampak positif terutama terhadap mobilitas masyarakat di wilayah Pulau Sumatra," jelasnya, Jumat (8/3).

Hingga akhir 2019, sebanyak empat ruas lain bakal rampung dan beroperasi. Keempat ruas itu yakni Medan—Binjai (17 kilometer), Pekabaru—Dumai (131 kilometer), Terbanggi Besar—Pematang Panggang (100 kilometer), dan Pematang Panggang—Kayu Agung (85 kilometer).

Berdasarkan Perpres No.117/2015, Utama Karya (HK) mendapatkan penugasan menggarap 24 ruas tol Trans-Sumatra dengan delapan ruas diharapkan selesai 2019.

Direktur Keuangan PT Utama Karya Anis Anjayani menambahkan ada dua ruas yang belum memulai konstruksi,

► Dalam kunjungan kerja ke Sumatra Presiden Joko Widodo meresmikan sedikitnya lima proyek infrastruktur.

yaitu Palembang—Tanjung Api Api dan Kuala Tanjung—Tebing Tinggi—Parapat. "Yang dikerjakan lebih dahulu Kuala Tanjung—Tebing—Tinggi Parapat," jelas Anis kepada Bisnis, Jumat (8/3).

Menurutnya, keberadaan jalan tol Trans-Sumatra bakal menopang industrialisasi di Sumatra, sebuah transformasi yang harus dilakukan untuk memutus ketergantungan terhadap ekspor komoditas.

### JANGKA PANJANG

Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan fluktuasi harga komoditas membuat perekonomian Sumatra labil.

Sejak 2014, dia menambahkan pertumbuhan ekonomi Sumatra selalu lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Bahkan, sumbangsih

# Operator Diminta Pasang *Speed Camera*

Bisnis, JAKARTA — Operator jalan tol diminta memasang kamera pemantau kecepatan kendaraan di beberapa ruas jalan tol sehubungan dengan rencana pemerintah menindak pengemudi yang melanggar batas kecepatan.

Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan ruas atau kilometer yang dipasang CCTV pemantau kecepatan atau *speed camera* akan ditentukan berdasarkan hasil mapping titik rawan kecelakaan (*blackspot*) oleh tim pokja.

Operator jalan tol juga diminta menambah pita penggaduh (*rumble strip*), rambu batas kecepatan, marka profil, papan peringatan *neon box*, dan *warning light*.

"Karena ini jalan berbayar, maka wajar operator memasang rambu, termasuk *speed camera*," ujarnya, Jumat (8/3).

Saat ini, Risal menjelaskan baru PT Jasa Marga Tbk. yang memasang kamera pemantau kecepatan, itu pun hanya di ruas tol Jagorawi.

Kemenhub ingin *speed camera* juga dipasang di ruas tol lain, termasuk Trans-Sumatra sekalipun belum ada catatan kejadian kecelakaan di jalan tol itu.

Kamera pemantau itu akan merekam

kecepatan kendaraan. Polisi kemudian akan melakukan penindakan terhadap pelanggar di pintu berikutnya yang dilewati pengendara.

Penindakan tidak hanya dikenakan pada pengemudi dengan kecepatan di atas batas maksimum, tetapi juga di bawah batas minimum. Alasannya, kecepatan di bawah 60 km per jam juga kerap menyebabkan kejadian tabrak belakang.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menambahkan truk barang dengan kecepatan kurang dari 60 km per jam juga patut dicurigai kelebihan muatan dan dimensi.

"Jadi, kalau nanti sudah dilakukan pengawasan, kami berharap selain jembatan timbang, itu [pemasangan kamera pemantau kecepatan] bisa mengurangi *overload*," katanya.

Untuk mencegah tabrak belakang pula, Kemenhub akan mempercepat pemasangan stiker pemantul cahaya pada truk yang melalui jalan tol. Regulasi pemasangan stiker akan dinaikkan dari saat ini Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 menjadi peraturan menteri perhubungan.

(Sri Mas Sari)

ekonomi Sumatra juga terus lungsur ke level 21,58% pada 2018 lalu dari posisi 2014 sebesar 23,16%.

"Kuncinya industrialisasi dan itu butuh infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan. Dalam jangka panjang, ini akan menjadi sentra pertumbuhan dan harapannya memang ada aglomerasi industri di wilayah itu," jelas Dendi kepada Bisnis.

Saat ini, sedikitnya ada tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah beroperasi seluas 6.958 hektare. Ketiga KEK itu yakni KEK Arun, KEK Sei Mangkei, dan KEK Galang Batang, dan KEK Tanjung Api Api. Selain itu, Dewan KEK mencatat, ada sepuluh KEK lain yang diusulkan di Sumatra seluas 7.415 hektare.

Dendi mengingatkan proyek jalan tol maupun industrialisasi merupakan proyek jangka panjang. Dia menyebutkan pembangunan jalan tol merupakan satu aspek yang perlu didukung pembangunan di sektor lainnya, seperti penyediaan energi, air, dan pelabuhan. Walhasil, megaprojek tol Trans-Sumatra baru akan menuai hasil 15 tahun-20 tahun dari sekarang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno mengapresiasi penyelesaian proyek tol Trans-Sumatra ruas Bakauheni—Terbanggi Besar yang dapat rampung dalam 4 tahun. "Kami sebagai BUMN cukup bangga karena ini benar-benar mulai dari nol," ujarnya dalam siaran pers.

Tol ruas Bakauheni—Terbanggi Besar digarap melalui kolaborasi utama Karya, PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

(M. Nurhadi Pratomo) 

Judul	<b>Milennial Bisa Akses Rumah Bersubsidi</b>	Tanggal	Sabtu, 09 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 10)		
Resume	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menawarkan kalangan milenial mengakses rumah bersubsidi dengan harga di bawah 150 juta. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan peluang milenial mendapatkan rumah murah terbuka lebar apalagi dengan berkembangnya teknologi mencari rumah tak lagi rumit dan lama.		

## ► BACKLOG PERUMAHAN

# Milennial Bisa Akses Rumah Bersubsidi

Bisnis, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menawarkan kalangan milenial mengakses rumah bersubsidi dengan harga di bawah 150 juta.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan peluang milenial mendapatkan rumah murah terbuka lebar apalagi dengan berkembangnya teknologi mencari rumah tak lagi rumit dan lama.

Menurutnya, persyaratan paling mudah untuk membeli rumah, terutama yang baru memiliki penghasilan adalah dengan mencari rumah subsidi dengan harga di bawah Rp150 juta. Calon pembeli rumah bisa mengajukan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia menyatakan FLPP menawarkan bunga tetap 5% hingga cicilan berakhir karena tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat dan dengan tenor hingga 20 tahun. "Jadi yang tadinya tidak mampu, jadi mampu mengangsur rumah meskipun penghasilan tidak seberapa," katanya, Jumat (8/3).

Syarat mengajukan FLPP yaitu pencari rumah hanya perlu memenuhi dokumen seperti

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan keterangan gaji tidak lebih dari Rp4 juta.

Sejak 2010 hingga kini, PPDPP sudah menyalurkan dana subsidi bergulir hingga Rp37 triliun dan sudah 586.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menikmati fasilitas tersebut.

Direktur Operasi PPDPP Nostra Tarigan menambahkan saat ini untuk pengurusan penyaluran FLPP sudah melalui sistem atau disebut e-FLPP. "Calon pemilik rumah juga bisa memasukkan dokumen kapan saja, tapi kalau tidak valid dokumennya akan dikembalikan, masalah utamanya biasanya karena program ini khusus untuk pemilik rumah pertama," kata Nostra.

Sementara itu, Head of Subsidized Mortgage Division Bank BTN Hirwandi Gafar menyebutkan menyediakan fasilitas agar masyarakat lebih mudah dalam mencari dan membeli rumah selain menyediakan fasilitas KPR.

Menurutnya, masyarakat bisa membeli rumah lewat portal *btnproperti.co.id* yang menyediakan layanan mencari rumah subsidi dan nonsubsidi hingga melakukan pembayaran ke pengembang.

(Mutlara Nabila)

Judul	Perkembangan Masih Belum Nyata	Tanggal	Senin, 11 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 5)		
Resume	Perkembangan pembangunan kota baru atau kota mandiri di Indonesia boleh dikatakan mandek. Belum ada pembangunan kota baru yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, selain Kota Maja di Banten. Pengembangan pun meminta pemerintah fokus dan memacu pengembagan kota baru. Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa perkembangan pembangunan kota baru masih datar dalam beberapa tahun terakhir.		

## ► PEMBANGUNAN 10 KOTA BARU

# Perkembangan Masih Belum Nyata

Bisnis, JAKARTA — Perkembangan pembangunan kota baru atau kota mandiri di Indonesia boleh dikatakan mandek. Belum ada pembangunan kota baru yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, selain Kota Maja di Banten. Pengembangan pun meminta pemerintah fokus dan memacu pengembangan kota baru.

## APA KABAR KOTA BARU?



Jika merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, ada 10 kota yang akan dikembangkan pemerintah menjadi kota mandiri. Namun, hingga memasuki 2019, belum ada perkembangan yang cukup nyata dari rencana tersebut. Hingga kini baru Kota Maja yang terus membangun.

Jika merujuk laman <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/ko>

tabaru/, di situ dicantumkan ada 11 perencanaan kota baru, yakni Kota Baru Pontianak, Tanjung Selor, Padang, Palembang, Maja, Banjar Baru, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Morotai. Padahal, beberapa waktu lalu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR melansir 10 kota baru yang menjadi prioritas untuk dibangun.

Mutiara Nabila  
rdaksi@bisnis.com

► Dalam pengembangan kota baru yang menjadi kendala adalah keberadaan *end user* dan sistem perpajakan yang belum memadai dari penduduk maupun pemerintah.

Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa perkembangan pembangunan kota baru masih datar dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, REI mewakili pengembangan menginginkan agar pemerintah fokus dan memacu pengembangannya, serta mempermudah dalam hal pengurusan perizinan terutama dalam pembukaan lahan.

"Perkembangannya belum ada yang baru, masih *flat* [datar], pengembang juga belum ada yang serius. Makanya, coba senggol kementerian supaya fokus dan dipacu pengembangannya," ungkapnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida, dalam pengembangan kota baru yang menjadi kendala adalah keberadaan *end user* dan sistem perpajakan yang belum memadai dari penduduk maupun pemerintah.

"Sejak lama pelaporan pajak itu kan enggak pernah benar, sepanjang Indonesia merdeka malah. Baru sekarang-sekarang ini ada lapor pajak lewat internet. Jadi, lebih mudah dan transparan," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (10/3).

Menurut Paulus, hingga saat ini masih banyak penduduk wajib pajak yang tidak membayar pajak mereka dengan baik dan benar. Hal ini, katanya, akan memengaruhi kemampuan pemerintah untuk melakukan pembangunan.

"Sebenarnya dari pengembang siap-siap saja kalau disuruh bangun kapan saja, tetapi kan *end user* juga susah dicari, masak tahu-tahu suruh pindah. Ya, nanti enggak mau. Terus kalau *end user*-nya belum jelas, nanti pengembang udah bangun enggak ada yang tinggal kan rugi. Kan pengembang harus bayar bunga juga," ungkapnya.

Solusi dari pemerintah, katanya, sudah ada, berupa penyediaan skema pembiayaan kepemilikan hunian untuk Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Namun, sampai sekarang aturannya belum ada juga. Jadi, gimana ya, susah juga buat kami mau bangun." Untuk perkembangannya sendiri, saat ini pengembang hanya mengandalkan proyek kota baru yang lama, salah satunya milik PT Jababeka Tbk., yang mengembangkan kota baru dan kawasan industri di Maluku Utara (Morotai).

Kendati demikian, Jababeka masih berfokus pada pembangunan kota di Cikarang, Jawa Barat terlebih dahulu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa dari sisi pemerintah, tengah dipersiapkan *masterplan* untuk pengembangan kota baru.

"Untuk kota baru ini, kami sedang mencoba buat *masterplan* untuk membangun kota baru lainnya. Di Tanjung Selor yang jelas sudah ada, dan beberapa kota lain, di Sofifi, Maluku Utara juga."

Khalawi menargetkan rencana induk tersebut rampung tahun ini. Saat ini, aturannya masih terus digodok dan ditamanangkan karena harus menyediakan seluruh fasilitas menyangkut tata ruang dan tata kota.

### BUKAN KOTA BARU

Pada bagian lain, Manager Research &

## Rencana Pengembangan 10 Kota Baru Prioritas di 10 Provinsi

### 1. Maja, Banten

Luas : 15.511 hektare

Rencana : Mengembangkan Hunian yang inklusif

### 2. Sofifi, Maluku Utara

Luas : 2.840,7 hektare

Rencana : Kota Sofifi sebagai pemerintahan, logistik /jasa dan pusat perdagangan

### 3. Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Luas : 11.390 hektare

Rencana : Pengembangan kawasan pusat pemerintahan dan fungsi pendukungnya

### 4. Pontianak, Kalimantan Barat

Luas : 1.080 hektare

Rencana : Revitalisasi dan penataan kawasan permukiman berbasis pada sungai

### 5. Banjar Baru, Kalimantan Selatan

Luas : 5.620,08 Ha

Rencana : Pengembangan konsep *aerocity*

### 6. Padang, Sumatra Barat

Luas : 4.308,77 hektare

Rencana : kota tangguh (*resilient city*)

### 7. Palembang, Sumatra Selatan

Luas : 4.330 hektare

Rencana : Pengembangan kawasan perkotaan dengan tema *sport city*

### 8. Sorong, Papua

Luas : 2.242 hektare

Rencana : Permukiman, kawasan industri, pusat kota baru, dan ruang terbuka hijau.

### 9. Makassar, Sulawesi Selatan

Luas : 1.592 hektare

Rencana : Pengembangan kawasan perumahan dengan tema Kota Baru Maritim

### 10. Manado, Sulawesi Utara

Luas : 5.160 hektare

Rencana : Pengembangan kawasan perkotaan dengan tema *aerocity*

Sumber: DPP, Kementerian PUPR 2016, data

BISNIS/VIWA/BOZARINA

Advisory Coldwell Banker Commercial Angra Angreni mengemukakan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan perusahaan itu, saat ini, pembangunan yang dilakukan pengembang masih dalam kisaran pembangunan rumah tapak, kompleks perumahan atau kluster, atau apartemen dan bukan

kota baru.

Adapun, pengembang juga harus membangun kerja sama dengan penyedia fasilitas-fasilitas kota, atau pengembang bisa juga berperan sebagai penyedia fasilitas itu sendiri, seperti penyediaan kendaraan umum.

"Selain itu, hal terpenting justru juga

harus ada dukungan dari pemerintah karena kan pemerintah yang lebih berperan, misalnya, terkait keputusan atau kebijakan arah pengembangan suatu wilayah. Jadi, ya, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan visi misi pengembang," katanya kepada *Bisnis*, Jumat (8/3). ■

Judul	<b>Situs Purbakala di Tol Pandaan-Malang Dikaji</b>	Tanggal	Senin, 11 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Pihak PT Jasa Marga masih menunggu kajian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terkait penemuan situs purbakala sebelum melanjutkan pembangunan sebagian ruas Jalan Tol Pandaan-Malang seksi V. Pembangunan terhenti satu pekan menyusul penemuan struktur yang diduga situs purbakala di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.		

## ARKEOLOGI

# Situs Purbakala di Tol Pandaan-Malang Dikaji

**MALANG, KOMPAS** — Pihak PT Jasa Marga masih menunggu kajian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terkait penemuan situs purbakala sebelum melanjutkan pembangunan sebagian ruas Jalan Tol Pandaan-Malang seksi V. Pembangunan terhenti satu pekan menyusul penemuan struktur yang diduga situs purbakala di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dari pantauan di lapangan, Minggu (10/3/2019), struktur itu berupa tumpukan batu bata yang tertutup gundukan tanah di sisi kanan jalan dari arah Pandaan. Ukuran batu bata lebih besar dibandingkan dengan batu bata yang umum digunakan saat ini. Batu bata yang semula tertimbun tanah itu terkikis alat berat ketika dilakukan perataan tanah di tepi Sungai Amprong.

Menurut salah seorang warga, Tamari (50), warga menemukan benda bersejarah itu lima bulan lalu. Awalnya, benda-benda itu ditemukan pekerja proyek lalu dijual kepada pihak lain. "Pada 1970-an, di tempat itu juga ditemukan arca setinggi 1,5 meter," ujarnya.

Selain batu bata, warga juga menemukan kepingan uang logam kuno dari perunggu beraksara China dan pecahan gerabah, termasuk giwang emas. Benda-benda tersebut banyak di tangan masyarakat dan mulai diperjualbelikan.

Agus Tri Antyo dari Bagian Humas PT Jasa Marga Pandaan-Malang, Minggu, mengatakan, hingga kini belum ada arahan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim. Hanya aktivitas di dekat situs dihentikan, sedangkan pekerjaan untuk bagian lain tetap berjalan seperti biasa. "Yang dihentikan pekerjaan pengurukan di Kilometer 37+700 berdekatan dengan lokasi yang diduga situs," kata Agus.

Tol Pandaan-Malang memiliki panjang 38,5 kilometer, terdiri dari seksi I Pandaan-Purwodadi (Kabupaten Pasuruan) 15,475 km, seksi II Purwodadi-Lawang 8,05 km (Pasuruan-Malang), seksi III Lawang-Singosari (Malang) 7,1 km, seksi IV Singosari-Pakis (Malang) 4,75 km, dan seksi V Pakis-Malang 3,113 km. Saat ini, pengerjaan seksi I-IV hampir selesai, sedangkan seksi V baru berjalan sebagian.

## Penggalian

Dihubungi terpisah, Kepala BPCB Jatim Andi Muhammad Said mengatakan, pihaknya sudah menurunkan petugas untuk mengecek temuan tersebut di lapangan. Akan ada ekskavasi (penggalian) lanjutan yang kemungkinan dilakukan pekan depan. "Kami koordinasi dulu dengan Jasa Marga untuk bisa melakukan pendataan secara lengkap," ucapnya.

Andi belum bisa memastikan jenis dan struktur bangunan yang ditemukan itu. Sejauh ini, informasi awal menyebutkan bahwa temuan itu sebagai punden desa. "Kondisinya sudah terbongkar, jadi perlu tindakan lebih lanjut. Bentuk pastinya baru diketahui setelah ada ekskavasi, termasuk dari masa kerajaan mana situs itu dibuat," ujarnya.

Mengacu pada temuan benda purbakala di tempat lain yang terungkap oleh proyek jalan tol, menurut Andi, harus dilihat signifikansi setiap benda-benda yang ditemukan. (WER)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Senin, 11 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 14)		
Resume	Tol Trans-Sumatra sesi ruas Bhakauheni-Terbanggi Besar diresmikan Joko Widodo di Lampung.		



**TOL TRANS-SUMATRA:** Tol Trans-Sumatra sesi ruas Bakauheni-Terbanggi Besar diresmikan Presiden Joko Widodo di Lampung, Sabtu (9/3). Tol sepanjang 140,9 km itu merupakan ruas tol terpanjang di Indonesia. Sementara itu, Tol Trans-Sumatra ruas Palembang-Lampung diperkirakan dapat terhubung pada Juni 2019.

Judul	<b>Tol Trans-Sumatra Gerakkan Ekonomi</b>	Tanggal	Sabtu, 09 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman Utama)		
Resume	<p>Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menyatakan terbukannya konektivitas melalui Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatra. "Hari ini merupakan salah satu catatan sejarah, yakni pembangunan infrastruktur konektivitas menyatukan Indonesia, terutama Jawa-Sumatra dengan JTTS dan dermaga eksekutif, yang Insya Allah menjadi tumpuan pusat pertumbuhan ekonomi baru setelah Jawa," kata Ridho kemarin se usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian ruas Tol Bhakauheni-Terbanggi Besar di Lampung yang berjarak 140,9 km dan merupakan ruas tol terpanjang yang pernah diresmikan Jokowi.</p>		

# Tol Trans-Sumatra Gerakkan Ekonomi

*Pemanfaatan tol akan lebih optimal jika didukung kondisi jalan daerah yang baik serta mampu menghubungkan sentra-sentra produksi.*

EVA PARDIANA

[pardiana@mediaindonesia.com](mailto:pardiana@mediaindonesia.com)

**G**UBERNUR Lampung M Ridho Ficardo menyatakan terbukanya konektivitas melalui Tol Trans-Sumatra (JTTS) akan membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatra.

"Hari ini merupakan salah satu catatan sejarah, yakni pembangunan infrastruktur konektivitas menyatukan Indonesia, terutama Jawa-Sumatra dengan JTTS dan dermaga eksekutif, yang Insya Allah menjadi tumpuan pusat pertumbuhan ekonomi baru setelah Jawa," kata Ridho kemarin se usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung yang berjarak 140,9 km dan merupakan ruas tol terpanjang yang pernah diresmikan Jokowi.

Ia juga menyebutkan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar akan difungsikan sebagai sistem logistik nasional dalam pendistribusian barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Presiden Jokowi berharap ruas tol ini dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dari dan ke Lampung. Selain itu, tol juga diharapkan dapat memicu masuknya investasi yang akan mendorong kemajuan ekonomi daerah.

"Ini akan memacu investasi untuk masuk ke lokasi yang berkaitan dan berdekatan dengan tol. Misalnya di Lampung, Pak Gubernur sudah merancang ada kawasan ekonomi khusus yang akan menarik dan memberikan fasilitas kepada investor sehingga tertarik ke sini," kata Presiden.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita, juga menyambut gembira rampungnya

ruas tol yang akan mempercepat pengiriman barang dari sentra produksi di selatan Sumatra ke Pelabuhan Panjang atau Bakauheni. "Di Sumatra, jalur nontol itu rawan kejahatan. Jadi, tol ini akan sangat membantu," ujar Zaldy.

Menurut dia, pemerintah kini juga harus memperhatikan ketersediaan kapal ro-ro di pelabuhan. "Jangan sampai terjadi *bottle neck*. Kapal ro-ro harus ditambah untuk mengangkut barang," tandasnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Lampung, Asrian Hendi Caya, mengatakan pemanfaatan tol lebih optimal jika didukung kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota yang baik serta mampu menghubungkan sentra produksi.

"Hadirnya tol juga diharapkan dapat mendorong hadirnya industri yang berorientasi bahan baku pertanian. Agar ekonomi Lampung dapat tumbuh dengan cepat, perlu didorong agroindustri," ujar Asrian.

## Pembangunan cepat

Pembangunan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar menelan biaya investasi sebesar Rp16,8 triliun. Ruas selanjutnya, yakni Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112 km yang kini masih dalam pengerjaan. Diharapkan, ruas tol dari Terbanggi Besar hingga Palembang berfungsi fungsional pada arus mudik 2019.

"Kita sebagai BUMN cukup bangga karena ini benar-benar dari nol. Tahun 2015 itu penentuan lokasi saja belum ada. Jadi, dari penentuan lokasi sampai selesai persis empat tahun," Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini menjelaskan tarif tol belum ditentukan. "Masih gratis tarif tolnya, kita tunggu sampai Kementerian PU-Pera mengeluarkan tarif," ujarnya. (Pra\*/Ant/X-11)

# Tol Bakauheni-Terbanggi Besar



Panjang  
140,938 km



Biaya investasi  
Rp16,8 triliun



## Paket Proyek Pengerjaan



## Pengerjaan :

- PT Utama Karya (persero)
- PT PP (persero) Tbk
- PT Wijaya Karya (persero) Tbk
- PT Waskita Karya (persero) Tbk
- PT Adhi Karya (persero) Tbk



Peletakan batu pertama  
**30 April 2015**

## Dampak Positif Pembangunan

- Meningkatkan perekonomian daerah sekitar
- Waktu tempuh jadi lebih singkat
- Memperlancar alur distribusi

Sumber: Kementerian BUMN/Tim Riset MI



MURAMDANI



MURAMDANI



ISTIMEWA

**PRESIDEN TUNTASKAN PENGADUAN:** (Foto dari atas) Presiden Joko Widodo berbicara dengan Nur Halimah warga Desa Tanjungsari, Lampung, yang menerobos ke panggung saat Presiden meresmikan Jalan Tol Trans-Sumatra di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, kemarin. Nur Halimah pingsan sebelum tuntas mengadukan masalahnya. Sesuai acara peresmian, Presiden kembali bertemu Nur Halimah di Rumah Makan Siang Malam untuk menuntaskan aduan warga tersebut.

Judul	Banjir di Tol buka lantaran Salah Desain	Tanggal	Sabtu, 09 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 2)		
Resume	Pemerintah menyimpulkan bahwa banjir yang melanda setidaknya 15 kabupaten di Jawa Timur, termasuk ruas Tol Ngawi-Kertosono, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Terendamnya Tol Trans-Jawa di Madiun itu pun bukan karena salah desain.		

# Banjir di Tol bukan lantaran Salah Desain

*Banjir yang melanda setidaknya 15 kabupaten di Jawa Timur mulai surut meski di beberapa daerah ketinggian air masih parah.*

**NUR ANVANNI**

anvanni@mediaindonesia.com

**P**EMERINTAH menyimpulkan bahwa banjir yang melanda setidaknya 15 kabupaten di Jawa Timur, termasuk ruas Tol Ngawi-Kertosono, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Terendamnya Tol Trans-Jawa di Madiun itu pun bukan karena salah desain.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi mengatakan tol kebanjiran lantaran Sungai Jeroan tak mampu lagi menampung air hujan. "Kapasitas tampung Sungai Jeroan hanya 800 meter kubik per detik, sedangkan curah hujan yang tinggi membuat debit air 1.060 meter kubik per detik," ujarnya.

Dia tegaskan bahwa tol itu sudah memperhitungkan elevasinya jika terjadi banjir tahunan. "Kalau banjir tahunan terjadi, itu levelnya di bawah tol."

Ruas tol yang terkena banjir pun elevasinya paling rendah. Hari mengatakan, untuk mence-

meluas ke arah kota," ucapnya di Jakarta.

Di Kabupaten Lamongan, banjir juga masih menggenangi 9 desa di 3 kecamatan, yakni Babat, Laren, dan Maduran setelah tanggul dalam Bengawan Solo jebol. Debit air yang begitu besar dari kawasan hulu membuat status siaga III atau siaga merah.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan Agud Hendrawan, debit air pada permukaan Bengawan Solo di kabupaten naik signifikan. Tanggul sungai pun jebol di Kecamatan Maduran sepanjang 70 meter sehingga banjir menerjang permukiman. "Yang jebol itu tanggul dalam, bukan tanggul utama Bengawan Solo," terangnya.

Begitu pula di Kabupaten Tuban, banjir luapan Bengawan Solo menggenangi 5 kecamatan, yakni Soko, Parengan, Rangel, Plumpang, dan Widang dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir juga merendam sedikitnya 1.300 hektare lahan pertanian. Di wilayah Tuban, permukaan bengawan berstatus siaga II atau siaga kuning.



MINDA/DW

gah peristiwa serupa terulang, pihaknya akan memperbaiki secara permanen parapet yang dipasang di sisi kiri-kanan jembatan. Karena terjangan air, parapet jebol sehingga air meluap ke tol.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto menyatakan banjir yang melanda ruas Tol Kertosono-Ngawi Km 603 hingga Km 604 bukan karena desainnya tak sempurna. Menurutnya, pembangunan semua tol sudah terlebih dulu melalui *feasibility study* dan lolos uji analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dan uji kelayakan lainnya.

"Jadi, ini bukan karena tol. Semua persyaratan sudah dilalui secara lengkap. Ini bukan soal desain dari tol itu. Tol hanya terdampak (luapan Sungai Jeroan karena curah hujan yang tinggi) dan sekarang sudah kembali normal," ucap Sugiyartanto.

## Mulai surut

Secara umum, banjir yang melanda Jatim mulai surut termasuk di Kabupaten Madiun. Namun, di beberapa daerah banjir masih tergolong parah. Di Kabupaten Ngawi, misalnya, menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, ketinggian air stabil di posisi 1 hingga 1,5 meter. "Genangan air

"Ini bukan karena tol. Semua persyaratan sudah dilalui secara lengkap. Ini bukan soal desain dari tol itu."

## Sugiyartanto

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban Joko Ludiyono menyatakan ketinggian air semakin meningkat seiring dengan naiknya permukaan Bengawan Solo. "Terlebih pada beberapa kawasan di hulu sungai juga dalam status siaga merah banjir. Berdasarkan pengamatan sore ini, genangan naik kembali, tetapi belum ada warga yang mengungsi."

Untuk mencegah agar banjir tak lagi melanda secara masif, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan perlunya tiga sodetan baru di Bengawan Solo untuk menambah dua sodetan yang sudah ada. Namun, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Charisal A Manu mengaku pihaknya belum bisa memberikan jawaban soal usulan itu. (Tim/X-8)

Judul	<b>KEK Pariwisata Mudahkan Investasi</b>	Tanggal	Sabtu, 09 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 11)		
Resume	Pemerintah serius membangun dan meningkatkan geliat pariwisata di wilayah Indonesia Timur. Asisten Deputi Bidang Investasi Kementerian Pariwisata, Hengky Manurung, menyampaikan hal itu dalam acara Forum Pariwisata Australia-Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Gold Coast, Queensland Australia, Tom Tate. Salah satunya menetapkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di daerah potensial. Tujuannya agar investor lebih mudah menanamkan modal.		

# KEK Pariwisata Mudahkan Investasi

PEMERINTAH serius membangun dan meningkatkan geliat pariwisata di wilayah Indonesia Timur. Asisten Deputi Bidang Investasi Kementerian Pariwisata, Hengky Manurung, menyampaikan hal itu dalam acara Forum Pariwisata Australia-Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Gold Coast, Queensland Australia, Tom Tate.

Salah satunya menetapkan status kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di daerah potensial. Tujuannya agar investor lebih mudah mena-

namkan modal. "Saat ini di kawasan timur telah ditetapkan dua KEK pariwisata, yakni Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat dan Morotai Maluku Utara. Ke depan bakal ditambah tiga KEK lain, yaitu Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan, Kupang Nusa Tenggara Timur, dan Misool di Papua Barat," kata Hengky.

Dengan berstatus KEK, dia berharap pengembangan destinasi lebih terarah sehingga menambah jumlah wisatawan mancanegara berwisata ke wilayah timur Indonesia.

Sebelumnya, Tom Tate ber-

bagi pengalaman bagaimana Kota Gold Coast sebagai salah satu kota wisata kelas dunia di wilayah timur Australia, apalagi penduduknya hanya 487 ribu jiwa.

Menurut Tom, setidaknya ada tiga poin utama mengapa Gold Coast jadi favorit bagi wisatawan. Pertama, warga Gold Coast mampu menawarkan kepada dunia berbagai destinasi menarik. Salah satu yang paling digemari ialah keindahan pantainya.

"Kedua ialah keramahan dan ketiga, kotanya mampu menciptakan ciri khas sendiri sembari terus membangun berbagai atraksi yang mem-

buat orang tertarik datang," kata Tom Tate.

Bentangannya mulai dari Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Sindangbarang, hingga Kecamatan Cidaun. "Potensi pantai dan laut di selatan Cianjur bisa kita kembangkan lagi menjadi objek wisata untuk menggaet wisatawan," kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman.

Jika potensi wisata alam itu ditata dan dikembangkan, ia yakin sektor pariwisata akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini Pemkab Cianjur menargetkan PAD pariwisata sebesar Rp20 miliar per tahun. (LN/BB/N-2)